BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Praktek

Dewasa ini keadaan masyarakat kita sedang mengalami kesulitan ekonomi. Banyak sekali ketidakseimbangan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dibidang ekonomi dampaknya sangat terasa dimasyarkat, ketidakpastian dibidang ekonomi ini sangat lama dirasakan oleh masyarakat sejak terjadinya krisis-krisis yang terjadi sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang diantaranya krisis moneter, krisis kepercayaan dan lain sebagainya.

Krisis-krisis yang terjadi selama ini karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan dana dari kas negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan masyarakat disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi. Oleh sebab itu pemerintah lebih meningkatkan pegawasan terhadap dana yang dikeluarkan dari kas negara.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utama dibandingkan yang lain, dengan demikian selaku pemerintah harus memperdayakan masyarakat agar membayar pajak guna meningkatkan pembangunan diseluruh bidang.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu badan milik pemerintah yang mengawasi keadaan harta, utang serta

penggunaan aliran dana dari pemerintah maupun dari pinjaman luar negeri sangat diharapkan sekali kebijaksanaannya. Dengan kebijaksanaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan dana-dana yang ada dapat digunakan sebagimana mestinya, sehingga tercipta kembali kestabilan ekonomi didalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan kerja praktek di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Jawa Barat. Secara umum bagaimanakah cara kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bagaimana tata usaha dan bidang keuangan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan seberapa besar andil yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pembangunan negeri ini ?. Kita dapat mempelajari laporan kerja praktek yang penulis kerjakan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meninjau bagiamana para pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberikan tunjangan khusus pajak PPh pasal 21 sesuai dengan yang telah dibebankan pada penghasilan pegawai tersebut, dengan adanya tunjangan khusus pajak maka penghasilan pegawai tidak akan mengalami pengurangan yang disebabkan adanya potongan PPh pasal 21, negara memberikan tunjangan khusus pajak kepada para pegawai agar kesejahteraan pegawai dapat bertambah dan bagaimana pengenaan PPh pasal 21 atas gaji dan bagimana cara perhitungannya. Dalam penyusunan laporan kerja praktek, penulis memberi judul laporan yakni :

"TINJAUAN ATAS TUNJANGAN KHUSUS PAJAK (PPh Pasal 21) DALAM PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT".

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Praktek

Tujuan kerja praktek di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui cara perhitungan tunjangan khusus pajak dan gaji pegawai serta pembebanan PPh pasal 21.
2. Mengetahui waktu dan cara pegawai menerima gaji.
3. Mengetahui prosedur yang dilakukan dalam mempersiapkan pembayaran gaji pegawai.

1.3 Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

Hasil kuliah kerja praktek ini berupa sekumpulan informasi mengenai tunjangan khusus pajak (PPh pasal 21) dalam pembayaran gaji pegawai yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang penulis lakukan antara lain, bagi :

1. Pihak Instansi

   Hasil kuliah kerja praktek ini dapat memberikan masukan untuk menambah informasi bagi instansi guna mengevaluasi kembali mengenai tunjangan khusus pajak (PPh pasal 21) dalam pembayaran gaji pegawai sebagai pertimbangan agar mampu mengendalikan pengeluaran dari kas

negara sesuai dengan yang telah di tetapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2. Penulis

   Akan mendapatkan pengalaman, menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman baru bagi penulis mengenai tunjangan khusus pajak (PPh pasal 21) dalam pembayaran gaji pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

UNIKOM

3. Pihak lain

   Dapat memberikan tambahan pengetahuan sebagai bahan referensi yang akan memberikan masukan dalam pengembangan masalah dan solusi di bidang kajian yang berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam laporan kuliah kerja praktek.

1.4 Metode Kuliah Kerja Praktek

Dalam menyusun laporan kuliah kerja praktek penulis menggunakan metode deskriptif yang berarti mengumpulkan data, mengintegrasikan, menggambarkan dan menyampaikan data-data yang mendukung penyusunan laporan ini, sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara :

1. Observasi

   Penulis mengadakan pengamatan secara langsung jalannya kegiatan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat pada saat berlangsungnya jam kerja.

2. Wawancara

   Pengumpulan data dengan berkomunikasi langsung dengan para pegawai dan pembimbing.

3. Studi Pustaka

   Pengumpulan data dengan mempelajari buku dan karya tulis lain yang digunakan sebagi dasar dalam pembuatan laporan ini.

4. Telaah Dokumen

   Pengumpulan data dengan membaca dokumen-dokumen yang ada.

1.5 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Kerja praktek yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di salah satu badan pemerintah non departemen yaitu di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Cibeureum 50 Bandung 40184, telepon (022) 640801, 6015108. Sedangkan waktu kerja praktek terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan 1 September 2003.